

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kredit

##### 2.1.1 Pengertian kredit

Menurut asal mulanya kredit berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan akan kembali. pengertian kredit menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kredit tersebut dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Misalnya bank memberi kredit untuk pembelian rumah atau kendaraan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit telah tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang harus dibayarkan. Demikian pula sanksi apabila debitur mengingkari janji terhadap perjanjian yang telah di sepakati.

Sebelum kredit diberikan, terlebih dahulu dilakukan analisis kredit dengan tujuan untuk meyakinkan bank bahwa debitur benar-benar dapat

dipercaya. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau badan hokum, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini yaitu untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang di berikan benar-benar aman, dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu sangat berbahaya bagi bank. Nasabah akan dengan sangat mudah memberikan data fiktif, sehingga kredit tersebut sebenarnya sangat tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika melakukan kesalahan dalam menganalisis kredit maka kredit yang disalurkan pasti akan sulit tertagih alias macet. Namun faktor kesalahan dalam menganalisis ini bukan merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet tersebut diakibatkan oleh kesalahan dalam menganalisis (Kasmir,2000)

### 2.1.2 Unsur-unsur kredit

Pada dasarnya struktur pengendalian intern yang baik tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan bagian akuntansi dan bagian keuangan, tetapi lebih luas dari pada itu. Oleh karena itu *AICPA* dalam SAS 55 menyatakan bahwa struktur pengendalian intern (dalam arti luas) sebagai berikut : (H.S.Munawir,Auditing Modern,edisi pertama,BPFE Yogyakarta,hal 229)

*"struktur pengendalian intern suatu perusahaan meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan tersebut akan dapat tercapai".*

Sedangkan menurut *The Committee of Sponsoring Commission Organization* (The COSO) Struktur pengendalian intern didefinisikan : (Kell, welter & William C.Boynton, Modern auditing, edisi 6, penerbit john willey & Sons.Inc, hal 254)

*“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen maupun personel lain dalam entitas yang di rancang untuk memberik keyakinan yang memadai dengan pencapaian tujuan sebagai berikut keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, kepetuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku”.*

Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam proses pemberian kredit. Unsur-unsur yang terkadang dalam pemberian suatu fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik yang berupa uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian dan analisis yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan analisis yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan kreditnya.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan terdapat juga unsur kesepakatan antara kredit dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu

perjanjian dimana masing-masing menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya dan resiko kerugian yang diakibatkan ketidaksengajaan nasabah dalam membayar kreditnya karena terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga bank, terutama untuk bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profinsi dan komisi serta biaya administrasi kredit itu merupakan keuntungan utama dari bank.

### 2.1.3. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat dari suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit yang diberikan telah

dilakukan analisis yang mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk menerima suatu kredit maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu dalam memberikan kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa cara penilaian kredit yang sering dilakukan, yaitu analisis 5C dan 7P. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dijabarkan sebagai berikut :

a. *Character*

*Character* adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon nasabah tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit harus benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan *social standingnya*. Karakter merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai keinginan nasabah dalam mengembalikan kreditnya. Orang yang berkarakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity*

*Capacity* adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis dan meraih laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kreditnya. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka akan semakin besar pula kemampuannya dalam mengembalikan kreditnya.

c. *Capital*

Biasanya bank akan tidak bersedia untuk membiayai usaha 100%. Nasabah juga harus mendapatkan dan dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah nominal kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

e. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-

masing dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil hendaknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu, walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan menilai prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7P adalah sabagai berikut :

a. *Personality*

*Personality* Adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

*Party* Adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari setiap golongan.

c. *Purpose*

*Purpose* Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan permohonan kredit, termasuk kredit yang diinginkan oleh nasabah.

d. *Prospect*

*Prospect* Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kreditnya atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kreditnya.

f. *Profitability*

*Profitability* Yaitu untuk menganalisa kemampuan nasabah dalam memperoleh laba usahanya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah untuk menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank dan mendapat perlindungan.

#### 2.1.4. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum nasabah memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian, mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit yang dikucurkan. Tahapan-tahapan ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau di tolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung di tolak.

Prosedur penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran

penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing, dalam prakteknya prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum dapat di bedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum.

Prosedur pemberian kredit secara umum oleh suatu badan hukum adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Proposal

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya berisi keterangan mengenai : riwayat perusahaan, tujuan pengambilan kredit, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit dan jaminan kredit. Selanjutnya proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti : akte pendirian perusahaan, bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, neraca dan laporan rugi/laba tiga tahun terakhir, fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan, daftar penghasilan bagi perseorangan, kartu keluarga bagi perseorangan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

c. Penilaian kelayakan kredit

d. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diingirkan.

e. Peninjauan ke lokasi

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara kedua

g. Keputusan kredit

h. Penandatanganan akan kredit

i. Realisasi kredit

## 2.2. Pengendalian intern

### 2.2.1. Pengertian

Ada beberapa definisi tentang pengendalian intern. SA seksi 319 *pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit laporan keuangan* paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tiga golongan berikut ini :

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Efektivitas dan efisiensi operasi

Dari definisi pengendalian intern tersebut beberapa konsep fundamental (*fundamental concepts*) berikut ini : (Committee of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission, Internal Control-Integrated Framework (Jersey City,NJ : American Institute of Certified Public Accountants,1992),hal 9-12

- a. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu pengendalian intern itu sendiri dan bukan merupakan suatu tujuan namun merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat persuasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bukan hanya sebagai tambahan dari infratraktur entitas.
- b. Meningkatkan ketelitian dan keterpercayaan data dan informasi akuntansi, dengan mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dan selalu memberi keluaran yang konsisten dari pengolahan data yang sejenis.
- c. Meningkatkan efisiensi di semua garis operasi perusahaan.
- d. Mendorong di laksanakan dan ditaatinya prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen.

Dan dalam pengendalian intern terdapat unsur-unsur pokok, menurut AICPA ada empat unsur pokok pengendalian intern yaitu :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

- 1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi Operasi dari fungsi akuntansi
- 2) Tidak satu departemen pun diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua tahap satu transaksi.

Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan untuk membagi tahap transaksi ketangan manajer berbagai unit organisasi yang dibentuk, sehingga semua tahap transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Dengan demikian dalam melaksanakan suatu transaksi terdapat pengecekan intern (*internal check*) diantara unit organisasi pelaksana.

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat system yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dokumen merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi.

- c. Praktek akuntansi yang sehat.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan system wewenang pada prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan prosedur untuk menjamin praktek yang sehat dalam pelaksanaannya.

- d. Karyawan yang kompeten yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Diantara empat elemen pokok system pengendalian intern di atas, elemen karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai elemen yang lain dapat ditiadakan. Meskipun demikian laporan keuangan yang dapat dipercaya masih dapat dihasilkan.

Sementara itu unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO antara lain : lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan.

Berikut ini akan diuraikan kelima unsur pokok pengendalian intern tersebut :

- a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian yang membentuk disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

1) Nilai integritas dan etika.

Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai desainnya namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika akan mengakibatkan tidak terwujudnya pengendalian intern.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel disetiap organisasi harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

3) Dewan komisaris komite audit.

Dalam perusahaan berbentuk peseroan terbatas jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen puncak maka kebebasan auditor dapat tampak berkurang di pandang dari sudut pandang para pemegang saham. Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggung jawaban oleh auditor,

padahal manajemen puncak menentukan pemilihan auditor yang diberi tugas audit atas laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggung jawaban laporan keuangan oleh manajemen puncak. Oleh karena itu untuk menciptakan independensi auditor, perusahaan-perusahaan yang go publik sebaiknya memberikan wewenang penunjukan auditor dari manajemen puncak kepada dewan komisaris atau komite audit.

4) **Filosofi dan gaya operasi**

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan panduan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Dalam berbisnis menejemen memiliki filosofi ini akan meletakkan kejujuran sebagai dasar bisnisnya. Laporan keuangan perusahaan ini akan digunakan sebagai alat manajemen untuk mencerminkan kejujuran pertanggung jawaban keuangan perusahaan kepada siapa saja yang berhubungan bisnis dengan mereka.

5) **Struktur Organisasi**

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan yang tidak

dapat dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur organisasi memberikan rangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas entitas. Pembangunan struktur organisasi suatu entitas mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab dalam satu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

6) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut dari pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggung jawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

7) Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian intern. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur maka unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap dapat menghasilkan laporan keuangan

yang dapat diandalkan. Pengendalian intern yang baik tidak dapat menghasilkan informasi keuangan yang handal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak jujur dan tidak kompeten.

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan, design dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditinjau untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.

c. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas serta menyelenggarakan pertanggung jawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, dan mentransfer penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan system akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan

dengan cara mencegah salah aji dalam asersi manajemen pada laporan keuangan. Oleh karena itu, system akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah :

- 1) Sah
- 2) Telah diotorisasi
- 3) Telah dicatat
- 4) Telah dinilai secara wajar
- 5) Telah digolongkan secara benar
- 6) Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
- 7) Telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

d. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat manajemen akan dan telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, baik pada tahap dasain maupun pengoprasian pengendalian pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern beroperasi seperti yang diharapkan dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

### 2.3. Atribut sampling

Dalam rangka untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengendalian intern, erat kaitanya dengan dipatuhinya pengendalian intern oleh setiap individu pada suatu organisasi yang menjadi bagian dari pengendalian itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan sebuah pengujian kepatuhan (*compliance test*). Salah satu metode pemeriksaan untuk menguji efektivitas pengendalian intern dapat digunakan metode atribut sampling.

Pengertian atribut sampling adalah suatu metode pemeriksaan system informasi akuntansi, pengendalian intern suatu organisasi bisnis dengan melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Untuk menguji bukti-bukti,

pemeriksa dapat menggunakan sample 100%. Akan tetapi tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai kualitasnya, dalam *judgment sample* pemeriksa memilih anggota sample berdasarkan pertimbangan dan menganalisa hasil pemeriksaan sample tersebut berdasarkan pertimbangan pemeriksa pula. Hasil evaluasi tidak dapat diproyeksikan secara sistematis bagi anggota. Langkah-langkah atribut sampling menurut AICPA (*accountant and accounting guide*) 1998 adalah sebagai berikut :

a. Penentuan tujuan pengendalian

Tujuan pengujian pengendalian adalah untuk menilai efektivitas perancangan dan pengoprasian pengendalian intern atau untuk menentukan efektivitas prosedur pengendalian intern dalam mencegah dan menemukan kesalahan saji dan material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan auditor melakukan pengujian pengendalian adalah untuk menentukan keandalan pengendalian dalam suatu siklus, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan resiko pengendalian.

b. Penentuan atribut dan simpangan

Atribut adalah suatu karakteristik dari suatu pengendalian, sedangkan simpangan adalah tidak adanya atau kurangnya suatu atribut. Berdasarkan pengetahuannya terhadap pengendalian intern auditor harus dapat menentukan atribut yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian intern yang akan diuji. Suatu atribut harus ditentukan

untuk setiap pengendalian yang akan diperlukan untuk menurunkan resiko pengendalian suatu asersi.

c. Populasi yang akan diambil sampelnya adalah formulir-formulir yang akan digunakan dalam sistem pemberian kredit seperti surat permohonan kredit, surat persetujuan kredit, surat penjaminan kredit dan slip kas C. Karena hasil sample hanya dapat diproyeksikan terhadap populasi dari mana sample tersebut dipilih, maka penentuan populasi harus sesuai dengan tujuan auditor.

d. Penetapan metode pemilihan sample

Tujuan sample audit adalah untuk mengambil suatu kesimpulan tentang satu atau lebih karakteristik populasi tanpa harus melakukan pengujian terhadap seluruh populasi. Namun pengambilan sample harus dilakukan secara acak sehingga setiap populasi memiliki kesempatan yang sama dan mencerminkan populasinya. Metode yang ada umumnya digunakan adalah :

- 1) *Random number sampling* atau sample nomor acak. Metode ini menggunakan table untuk memilih satuan sample dari suatu populasi. Table tersebut berisi kolom-kolom dan jajaran angka-angka. Auditor dapat memulai angka manapun kemudian di telusur kekolom atau jajaran angka sehingga ditemukan yang mengidentifikasi nomor satuan sample.
- 2) *Systematic sampling* atau penentuan sample secara sistematis. Metode sample ini menyangkut pemilihan sample ke-n dari

populasi yang sudah berurutan. Metode ini tidak perlu menentukan hubungan antara populasi dengan angka random dan akan bermanfaat jika populasi tidak memiliki nomor identifikasi. Pengambilan sample dilakukan dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sample yang diinginkan.

- 3) *Blocking sampling*. Dalam penentuan sample dengan metode ini populasi dibagi menjadi beberapa blok yang berurutan
- 4) *Haphazard sampling* atau penentuan sample secara sembarang, berisi satuan-satuan sample yang dipilih tanpa alasan tertentu, tetapi juga tanpa bias atau prasangka yang tanpa disengaja. Seperti halnya *blocking sampling*, *haphazard sampling* mungkin gagal untuk memperoleh sample yang representative atau mencerminkan populasi yang diuji.
- 5) *Stratified sampling*. Metode penentuan sample ini sama dengan *blocking sampling*. Namun dalam *stratified* populasi dibagi kedalam kelompok atau strata yang homogen dan pemilihan atau evaluasinya terpisah untuk masing-masing strata. Pemilihan sample dapat dilakukan secara random, sistematis, blok atau sembarang. Sample dengan strata didasarkan pada suatu anggapan bahwa sample dalam suatu strata populasi mempunyai kesamaan dengan sample dari populasi lainnya.

e. Penentuan jumlah sampel.

Dalam kaitannya untuk menentukan jumlah sample yang diinginkan untuk atribut sampling maka auditor harus memperhatikan :

- 1) Resiko penentuan keandalan SPI
- 2) Tingkat penyimpangan yang ditoleransi
- 3) Tingkat penyimpangan yang populasi yang diperkirakan

f. Pelaksanaan pengambilan sample

Jika auditor telah menetapkan resiko *over reliance* dan tingkat penyimpangan populasi yang ditetapkan dan ditoleransi, maka sample audit ditentukan dari table standar.

g. Evaluasi hasil sample

Setelah melaksanakan pemilihan sample, auditor meringkas dan mengevaluasi hasilnya dengan langkah-langkah berikut :

- 1) Menentukan tingkat penyimpangan sample
- 2) Menentukan maksimum tingkat penyimpangan populasi
- 3) Mempertimbangkan informasi kualitatif
- 4) Mengambil kesimpulan secara menyeluruh

### 2.3.1 Model Atribut Sampling

Dalam atribut sampling dikenal tiga model yang dapat digunakan untuk pengujian kepatuhan terhadap pengendalian. Ketiga model tersebut adalah :

a. *fixed-sample-size attribute* sampling

Model pengambilan sample ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Pengambilan sample dengan menggunakan

model ini ditujukan untuk memperkirakan persentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Misalnya, dengan model ini auditor dapat memperkirakan berapa persen bukti kas keluar yang terdapat pada populasi yang tidak dilampiri bukti pendukung yang lengkap. Model ini digunakan terutama jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur struktur pengendalian intern dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan.

*b. Stop or go sampling*

Model pengambilan sample ini sering juga disebut dengan *decision attribute sampling*. Model ini mencegah auditor dari pengambilan sample yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil.

*c. Discovery sampling*

Model ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah (mendekati nol). *Discovery sampling* dipakai auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur struktur pengendalian intern dan ketidakberesan lainnya.

### **2.3.2 fixed-Sample-Size Attribute Sampling**

Ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengambilan sample.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penentuan atribut

Sebelum auditor melakukan pengambilan sample, ia harus secara seksama menentukan atribut yang akan diperiksa. Atribut adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan pengujian mengendalikan atribut adalah penyimpangan dari atau tidak adanya unsur tertentu dalam suatu struktur pengendalian intern yang seharusnya ada.

b. Penentuan populasi

Setelah atribut yang telah diuji ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. Populasi yang akan diambil sampelnya adalah formulir-formulir yang digunakan dalam sistem pemberia kredit seperti surat permohonan kredit, surat persetujuan kredit, surat perjanjian kredit dan bukti kas C.

c. Penentuan besarnya sample

Untuk menentukan besarnya sample yang akan diambil dari populasi tersebut secara statistic, maka auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini :

- 1) Menentukan tingkat keandalan (*reliably level*) atau *confidence level* atau R%
- 2) Penaksiran terjadinya atribut pada populasi.

- 3) Menentukan batas ketetapan atas yang diinginkan (*Desired Upper Precision Limit*) atau DUPL.
- 4) Menggunakan table penentuan besarnya sample untuk menentukan besarnya sample. Tabel penentuan besarnya sample yang tersedia adalah disusun menurut R%.

d. Pemilihan anggota sample dari seluruh anggota populasi.

Setelah ditentukan maka akan muncul masalah mengenai bagaimana menyeleksi sample agar anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Maka akan digunakan angka acak.

e. Pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas elemen pengendalian intern.

f. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap attribut anggota sample yang dipilih dengan cara membandingkan DUPL dan AUPL-nya.